

STATE CAPITALISM dan MAQASHID SYARIAH

(Reinkarnasi Gagal Kapitalisme Jilid Baru)

Oleh Bambang Hermanto, MA¹

ABSTRAK

Perkembangan kapitalisme negara saat ini yang menurut banyak ahli ekonomi disebut sebagai kapitalisme jilid IV. Istilah *state capitalism* sendiri muncul pada dasarnya sebagai reaksi dari negara yang menganut kapitalisme dalam merespon kritikan para sosialis yang pada dasarnya menginginkan peran negara yang besar dalam sistem ekonomi. Kegagalan kapitalisme oleh negara kapitalisme disembunyikan dengan ide kemampuan kapitalisme untuk bermetamorfosis dengan kendala dan permasalahan ekonomi yang terus berubah seiring dengan dinamika masyarakat. Kapitalisme negara yang berasal dari kapitalisme korporasi tersebut yang justru berubah menjadi kapitalisme negara yang merupakan reinkarnasi gagal dari sistem kapitalisme. Kegagalan state kapitalisme yang didominasi oleh sektor moneter yang rapuh serta fiskal yang tidak adil menyebabkan kapitalisme harus berkhianat dari makna hakikinya. Dengan demikian reinkarnasi kapitalisme menjadi kapitalisme negara adalah bukti betapa kapitalis telah bermetamorfosa mendekati kejadian lawannya (sosialisme). Di sisi lain hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Sebagai bagian dari paradigma agama Islam, penerapan hukum Islam menjadi misi agama, dan ini menuntut operasionalisasi hukum Islam dalam realitas-empiris. Namun, pada saat yang sama hukum Islam pun menjadi bagian dari paradigma negara yang mempunyai sistemnya sendiri yang *nota bene* diselimuti oleh konteks pluralitas yang menuntut adanya netralitas (tidak berpihak pada salah satu agama) sehingga mau tak mau negara mereduksi hukum Islam demi komitmen atas pluralitas itu sehingga penganut agama lain merasa tidak terancam. Konsekuensinya, masalah penerapan hukum Islam menjadi rumit karena hukum Islam itu berada di domain agama dan domain negara sekaligus, dalam lingkaran tarik-menarik antara prinsip agama dan prinsip negara.

Ketword: *State Capitalisme, maqashid syariah, ekonomi Islam*

¹ Dosen pada prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

A. Pendahuluan

Sejak zaman Aris Toteles pemikiran ekonomi melewati masa yang amat panjang untuk dapat sampai pada bentuknya seperti sekarang ini. Pada abad pertengahan, sesudah zaman renaissance kaum pedagang pernah dianggap sebagai penjahat pencuri karena mereka hanya mengambil laba dari usahanya. Di zaman kekuasaan gereja di Eropa banyak sekali peraturan yang dibuat orang untuk mengecam praktek pembungaan uang. Tidak hanya itu tokoh gereja juga ada yang masyhur sebagai tokoh ekonomi seperti Thomas Aquinas dengan suatu pernyataannya bahwa waktu adalah milik Tuhan dan tidak boleh dijadikan uang. Pada masa ini pula berbagai aturan dibuat tentang dominannya peranan pemerintah dalam perekonomian, antara lain yang dilakukan oleh Colbert, seorang Menteri Keuangan pada masa Raja Lodewijk XIV di Prancis.²

Dominasi neo kapitalis ini menggiring munculnya dunia yang tak ramah dan berbagai kondisi yang tidak diinginkan. Globalisasi dan perdagangan bebasnya telah menjungkirbalikkan berbagai bentuk dan sistem baik secara simbolik maupun muatan fundamental dari berbagai sistem yang diterpanya. Globalisasi menjadi sesuatu yang niscaya dan tak dapat dihindari. Ia telah menempatkan negara dunmia ketiga termasuk di dalamnya mayoritas negara muslim, menjadi teralinasi dan menjadi objek negara kapitalis.

² Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: 2000, Rajagrafindo Persada) h. 6

Sisi negatif dari sistem kapitalis bukanlah wacana pertama ekonom muslim, sebelumnya kaum marxis sudah melakukan pendataan efek-efek negatif dari kapitalisme ini. Jurgen Habermas, juga melihat bahwa industrialisasi barat (nama lain dari kapitalisme) telah mereduksi dunia manusia dengan menyempitkannya menjadi beberapa bentuk efisiensi ekonomi untuk mendapatkan materi. Dengan demikian masalah ekonomi global tidak bisa dilihat secara terpisah dengan sektor kehidupan lain. Ekonomi hanyalah satu aspek dari kesatuan total kemanusiaan secara global.³ Ditambah lagi pendekatan matematis dalam ekonomi yang sangat dominan mulai abad ke-19 telah turut mematikan ruh humanisme dan menempatkan materi sebagai tujuan utama.

Di Indonesia, arus globalisasi membawa dampak krisis ekonomi yang berlangsung membawa pengaruh yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Berbagai wabah yang dapat dilihat antara lain meningkatnya angka kemiskinan, angka pengangguran akibat terhentinya berbagai aktifitas produksi dan perdagangan, tingginya beban hidup, menurunnya daya beli akibat melambungnya harga berbagai komoditas barang dan jasa. Gejolak sosial ekonomi di beberapa daerah menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan, dengan semakin lemahnya fundamental ekonomi baik secara makro maupun mikro.⁴ Dengan demikian sudah saatnya umat muslim bangun dari mimpi dan menyadari apa yang sedang dihadapi.

³ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris dan Jerman*, (Jakarta: 2002, Gramedia) h. 245

⁴ M. Ismail Yusanto, *Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam*, (Bogor: 2003, Al-Azhar Press) h. 6-9

Doktrin ekonomi Islam semestinya berkembang dalam alam yang paralel bersama ekonomi konvensional dan alam akan menseleksi dengan sendirinya. Pertentangan paradigma semestinya dihentikan dan pendekatan pragmatis yang digunakan dalam sistem ekonomi konvensional mesti dihadapi dengan pendekatan yang sama.

Namun di tengah perkembangan tersebut kapitalisme yang menurut banyak ahli ekonomi sedang sekarat justru muncul dan berupaya survive dengan model baru. Kapitalisme korporasi yang berubah menjadi kapitalisme negara justru merupakan reinkarnasi yang masih diharapkan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam tulisan ini penulis berupaya untuk menggagas bagaimana salah satu konsep pemikiran syariat dalam mainframe yang dikenal dengan maqashid al-syar'iyah sebagai jalan keluar dari kegagalan neo-kapitalisme ini.

B. State Capitalisme: Buah Kegagalan Reinkarnasi Kapitalisme

Kapitalisme berasal dari kata capital yang berasal dari kata Latin *caput* yang berarti “kepala”. Arti ini menjadi jelas, misalnya dalam istilah “pendapatan per kapita” – pendapatan per kepala. Juga masih konsisten, ketika dipakai untuk, misalnya *capital city* – kota *utama*. Apa hubungannya dengan “*capital*” yang lain – yang sering kita terjemahkan sebagai “modal”? Konon kekayaan penduduk Romawi kuno diukur oleh berapa *kepala* hewan ternak yang ia miliki. Semakin banyak *caput*-nya, semakin sejahtera. Tidak mengherankan, jika kemudian mereka

“mengumpulkan” sebanyak-banyaknya *caput*. Sekarang jelas sudah, mengapa kita menterjemahkan *capital* sebagai “modal”. Lantas, kata *isme* mengacu kepada “paham”, “ideologi”: cara pandang atau cara hidup yang diterima oleh sekelompok luas masyarakat dan karenanya menjadi konvensi. Sebenarnya mudah saja mengartikan “kapitalisme”, setelah kita setuju bahwa “kapital” adalah “modal”. Kapitalisme adalah modal-isme: paham yang berdasarkan modal. Beberapa sumber sering mengatakan bahwa kapitalisme sebagai *ideologi* harus dibedakan dengan kapitalisme sebagai *fenomena*. Yang pertama mengacu kepada kepemilikan pribadi atas barang modal dan yang kedua lebih kepada kerangka filosofis yang mendukung sistem tersebut. Menurut saya, dikotomi ini tidak jelas. Dan, sebagaimana yang kita bicarakan di bawah, kapitalisme sebagai ideologi dan sebagai fenomena sukar dipisahkan.

Salah satu ciri dasar dari kapitalisme adalah sistem ekonomi pasar sebagai suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna. Model ini seluruhnya khayal. Sistem ekonomi pasar yang dicetuskan oleh Adam Smith berintikan: “tangan yang tidak terlihat akan menggerakkan kegiatan ekonomi yaitu dengan adanya keinginan

seseorang/sekelompok orang yang memberikan sebuah barang dan atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya (pertukaran).

Disamping itu dalam sistem ini semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (swasta) dan pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Suatu perekonomian pasar/liberal/bebas/kapitalis dengan lembaga milik pribadi dan warisan menimbulkan kondisi untuk mengumpulkan kekayaan dan mempertahankannya dalam lingkungan keluarga dari satu ke lain generasi. Ekonomi pasar efektif dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran pasar untuk masing-masing produk, tapi perekonomian pasar kurang bisa diharapkan dalam menciptakan keseimbangan makro ekonomi.⁵

Anthony Giddens menyatakan era modern disangga oleh kekuatan kapitalisme, negara bangsa, organisasi militer dan industrialisasi. Kapitalisme merujuk pada sejumlah prinsip struktural yang mendasari praktik akumulasi modal dalam konteks pasar produksi dan tenaga kerja yang kompetitif. Sedang negara-bangsa menunjuk pada prinsip struktural yang mengoordinasi praktik kontrol atas informasi, supervisi sosial dan pemata-mataan. Lalu militerisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik pengontrolan atas alat-alat kekerasan dalam konteks industrialisasi perang. Akhirnya industrialisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik-praktik yang bertujuan untuk mengubah alam atau pembangunan lingkungan non alami. Keempatnya merupakan tulang punggung yang

⁵ Gregory Grossman. *Sistem-sistem ekonomi. Cetakan ketiga.* (Jakarta: 1995, PT Bumi Aksara) h. 68-68

menghamba pada modernitas dan darinya proses transformasi sosial masyarakat bekerja. Dalam konteks ini, kapitalisme menjadi sistem yang berkait-erat dengan proses berjalannya modal. Kapitalisme membawa dunia pada sistem perekonomian yang tunduk pada norma serta aturan pasar. Terobosan kapitalisme adalah membentuk sistem pasar yang hegemonik dimana kekuasaan privat juga memiliki kemampuan untuk mencipta pengaruh pada kawasan publik. Adam Smith sebagai peletak dasar pemikiran kapitalisme menjelaskan bekerjanya mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi. Melaluinya, kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang ada pada setiap komoditi. Ukuran riil dari nilai tukar komoditi, harus dilihat dari kondisi pertukaran, dimana 'ukuran riil' dari nilai komoditi adalah kuantitas dari kerja yang berada dalam barang-barang lain yang dapat dipertukarkan di pasar.⁶

Dalam perkembangan kapitalisme jilid IV ini ide dasar kapitalisme telah bermetamorfosa dalam bentuk kapitalisme negara. Grinder⁷ menyebutkan: Political intervention inevitably transforms the market system from a matrix of purely "economic means" for the acquisition and preservation of wealth to a system far

⁶ Kalimat yang populer dari Adam Smith "*Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir atau tukang rot', kita mengharapkan mendapat makanan; melainkan dari penghargaan mereka atas kepentingan din mereka masing-masing. Kita camkan dalam din kita, bahwa bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dan rasa cinta terhadap diri-sendiri; dan tak akan kita berbicara pada mereka mengenai kebutuhan-kebutuhan kita bersama, melainkan atas dasar laba yang bisa mereka raih.* Bonnie Setiawan, *Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga*, Insist Press, 1999

⁷ Walter E. Grinder & John Hagel, *Toward A Theory Of State Capitalism: Ultimate Decision-Making And Class Structure*, dalam *Journal of Librarian Studies*, Vol.1. I. No. I, h. 59-79. Pergamon Preu 1917. Printed in Great Britain

more infused with the principles and institutions of the "political means". These terms - "economic means" and "political means" were coined by the German sociologist Franz Oppenheimer⁸ and are defined as follows:

1. the "economic means" involve the acquisition of wealth through one's own labor and subsequent voluntary exchange relationship while
2. the "political means" covers all other means of acquiring wealth. The latter therefore encompasses the direct or indirect expropriation of previously produced wealth either through direct coercion or through the threat of coercion. The prevalent means of expropriation (and hence exploitation) is taxation. Taxation is also the source of most other indirect forms of intervention which, in turn, lead to even greater exploitation.

Pertumbuhan awal state capitalism sebenarnya sudah dimulai sejak kapitalisme pinggiran yang ditandai oleh didirikannya perusahaan negara N.H.M (*Nederlandsche Handel Maatschappij*) pada tahun 1825 dan *Javasche Bank* tahun 1828, disertai dengan intervensi langsung oleh negara dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.⁸ Pada era modern penjelmaan neo kapitalism ini terindikasi dari dua model:

1. Negara berperan aktif sebagai agen pembangunan itu sendiri dengan membangun infra struktur dan menjalankan kegiatan produksi dan

⁸ Uraian sejarah kapitalisme pinggiran ini tidak didasarkan pada sumber primer, tetapi sumber sekunder. Karya-karya di bawah ini tetap merupakan karya-karya klasik: J. H. Boeke, *Economics and Economic Policy of Dual Societies As Exemplified by Indonesia* (Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1953)

pedagangan serta menyiapkan berbagai regulasi yang memadai bagi proses akumulasi kapital.

2. Negara secara sadar melindungi dan menghidupi kelas pemilik modal dengan menyediakan proyek pembangunan sebagai lahan usaha dan memberikan lisensi dan monopoli perdagangan serta menggelontorkan kredit dan membuat kebijakan yang menguntungkan pengusaha.⁹

Istilah *state capitalism* sendiri muncul pada dasarnya sebagai reaksi dari negara yang menganut kapitalisme dalam merespon kritikan para sosialis yang pada dasarnya menginginkan peran negara yang besar dalam sistem ekonomi. Kegagalan kapitalisme oleh negara kapitalisme disembunyikan dengan ide kemampuan kapitalisme untuk bermetamorfosis dengan kendala dan permasalahan ekonomi yang terus berubah seiring dengan dinamika masyarakat.

Namun akibat dari state kapitalisme ini justru memperparah destruksi yang dihasilkan kapitalisme korporasi. Belum lama ini, Media Indonesia menyajikan hasil survei Litbang Media Group, terhadap 480 responden yang diambil secara acak dari daftar pemilik telepon enam kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar). Mayoritas responden (73%) merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin berat; sebanyak 21% responden merasakan sama saja; dan hanya 6% yang merasakan semakin ringan. Ketika ditanyakan apakah sekarang ini mendapatkan pekerjaan baru dirasakan semakin sulit

⁹ Eric Haijer, *Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia*, dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 10 no. 1, Juli 2006. H. 91

atau semakin mudah, sebagian besar responden (89%) merasakan sekarang makin sulit mencari pekerjaan baru; sebanyak 5% responden merasakan sama saja; 4% merasakan makin mudah; dan 2% tidak tahu. Hasil survei ini tidak berbeda dengan laporan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk tahun 2007/2008 dari United Nations Development Programme (UNDP). Peringkat IPM Indonesia tahun 2007 berada di urutan 107 dari 177 negara. Selain semakin jauh tertinggal oleh Singapura (peringkat 25), Brunei Darussalam (30), Malaysia (63), Thailand (78), dan Filipina (90), peringkat Indonesia juga sudah terkejar oleh Vietnam (105) yang pada tahun 2006 berada di peringkat 109. Tanpa perbaikan strategi pembangunan ekonomi dan sosial secara mendasar, peringkat IPM Indonesia tidak menutup kemungkinan segera disusul oleh Laos (130), Kamboja (131) dan Myanmar (132) di tahun-tahun mendatang.¹⁰

Hingga saat ini, jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat mencemaskan. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin adalah 37,17 juta orang atau 16,58% dari total penduduk Indonesia. Satu tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 39,30 juta atau sebesar 17,75% dari total jumlah penduduk Indonesia tahun tersebut (TKPK, 2007). Ini berarti jumlah orang miskin turun sebesar 2,13 juta jiwa. Meskipun terjadi penurunan, secara absolut angka ini tetap saja besar dan melampaui keseluruhan jumlah penduduk Selandia Baru (4 juta),

¹⁰ Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: 2006, Alfabeta). Lihat juga United Nations Development Programme (2007), *Human Development Report 2007/2008: Fighting Climate Change, Human Solidarity in a Divided World*, New York: Palgrave Mcmillan.

Australia (12 juta), dan Malaysia (25 juta). Angka kemiskinan ini menggunakan poverty line dari BPS sekitar Rp.5.500 per kapita per hari.³ Jika menggunakan poverty line dari Bank Dunia sebesar US\$2 per kapita per hari, diperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia berkisar antara 50-60% dari total penduduk.

Dalam analisa akhirnya Francis Fukuyama dalam bukunya *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*, menunjukkan bahwa pengurangan peran negara dalam hal-hal yang memang merupakan fungsinya hanya akan menimbulkan problematika baru. Bukan hanya memperparah kemiskinan dan kesenjangan sosial, melainkan pula menyulut konflik sosial dan perang sipil yang meminta korban jutaan jiwa. Keruntuhan atau kelemahan negara telah menciptakan berbagai malapetaka kemanusiaan dan hak azasi manusia selama tahun 1990-an di Somalia, Haiti, Kamboja, Bosnia, Kosovo, dan Timor Timur.¹¹

Untuk membungkus kegagalan kapitalisme negara, ide dasar negara kesejahteraan yang beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) menjadi pamanis kapitalisme jilid akhir ini. Berdasarkan prinsip utilitarianisme, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal

¹¹ Fukuyama, Francis, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, (Jakarta: 2005, Gramedia)

sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father of welfare states). Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “*stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.*” Dapat dikatakan, negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’ (compassionate capitalism).

Dari paparan di atas, terlihat dengan nyata, bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang menganut *laize faire* dan berbasis *riba* kembali tergugat. Faham neoliberalisme tidak bisa dipertahankan. Sebenarnya, sejak awal tahun 1940-an, para ahli ekonomi Barat, telah menyadari indikasi kegagalan tersebut. Adalah Joseph Schumpeter dengan bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy* menyebutkan bahwa teori ekonomi modern telah memasuki masa-masa krisis. Pandangan yang sama dikemukakan juga oleh ekonom generasi 1950-an dan 60-an, seperti Daniel Bell dan Irving Kristol dalam buku *The Crisis in Economic Theory*. Demikian pula Gunnar

Myrdal dalam buku *Institutional Economics, Journal of Economic Issues*, juga Hla Mynt, dalam buku *Economic Theory and the Underdeveloped Countries* serta Mahbubul Haq dalam buku *The Poverty Curtain : Choices for the Third World*.

Pandangan miring kepada kapitalisme tersebut semakin keras pada era 1990-an di mana berbagai ahli ekonomi Barat generasi dekade ini dan para ahli ekonomi Islam pada generasi yang sama menyatakan secara tegas bahwa teori ekonomi telah mati, di antaranya yang paling menonjol adalah Paul Ormerod. Dia menulis buku (1994) berjudul *The Death of Economics (Matinya Ilmu Ekonomi)*. Dalam buku ini ia menyatakan bahwa dunia saat ini dilanda suatu kecemasan yang maha dahsyat dengan kurang dapat beroperasinya sistem ekonomi yang memiliki ketahanan untuk menghadapi setiap gejolak ekonomi maupun moneter. Indikasi yang dapat disebutkan di sini adalah pada akhir abad 19 dunia mengalami krisis dengan jumlah tingkat pengangguran yang tidak hanya terjadi di belahan diunia negara-negara berkembang akan tetapi juga melanda negara-negara maju. Selanjutnya Omerrod menandakan bahwa ahli ekonomi terjebak pada ideologi kapitalisme yang mekanistik yang ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membantu dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia. Mekanisme pasar yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan kapitalis cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok orang tertentu.

Karena itu, kini telah mencul gelombang kesadaran untuk menemukan dan menggunakan sistem ekonomi "baru" yang membawa implikasi keadilan,

pemerataan, kemakmuran secara komprehensif serta pencapaian tujuan-tujuan efisiensi. Konsep ekonomi baru tersebut dipandang sangat mendesak diwujudkan. Konstruksi ekonomi tersebut dilakukan dengan analisis objektif terhadap keseluruhan format ekonomi kontemporer dengan pandangan yang jernih dan pendekatan yang segar dan komprehensif. Di bawah dominasi kapitalisme, kerusakan ekonomi terjadi di mana-mana. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perekonomian dunia tengah memasuki suatu fase yang sangat tidak stabil dan masa depan yang sama sekali tidak menentu. Setelah mengalami masa sulit karena tingginya tingkat inflasi, ekonomi dunia kembali mengalami resesi yang mendalam, tingkat pengangguran yang parah, ditambah tingginya tingkat suku bunga riil serta fluktuasi nilai tukar yang tidak sehat. Dampaknya tentu saja kehancuran sendi-sendi perekonomian negara-negara berkembang, proyek-proyek raksasa terpaksa mengalami penjadwalan ulang, ratusan pengusaha gulung tikar, harga-harga barang dan jasa termasuk barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan tak terkendali. Krisis tersebut semakin memprihatinkan karena adanya kemiskinan ekstrim di banyak negara, berbagai bentuk ketidakadilan sosio-ekonomi, besarnya defisit neraca pembayaran, dan ketidakmampuan beberapa negara berkembang untuk membayar kembali hutang mereka.

Melihat fenomena-fenomena yang tragis tersebut, maka tidak mengherankan apabila sejumlah pakar ekonomi terkemuka, mengkritik dan mencemaskan kemampuan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi di muka

bumi ini. Bahkan cukup banyak klaim yang menyebutkan bahwa kapitalisme telah gagal sebagai sistem dan model ekonomi.

C. Implementasi Maqashid Syariah dan Antisipasi Kegagalan Kapitalisme IV

Salah satu wujud implementasi penalaran hukum Islam dalam ranah ekonomi adalah mengeksplorasi kerangka filosofis sebagai maksud syara` untuk membangun fundamen keilmuan ekonomi Islam. Pentingnya kembali pada ide dasar Islam itu sendiri karena menurut Baeck: ¹²

Discussion of Islamic economics must begin with discussion of Islam itself. Originating in the seventh century, the teachings of the prophet Muhammad formed Islam. The religion, as regarded by economic historian Louis Baeck, “was a religious and social response to the crisis in clan society and to the primitive ethics of the desert people in the Hijaz.”

Chapra menyebutkan: “Islamic economic systems directly imply Islamic religious thought. Two major tenets of Islam form the basis of Islamic economics. The single most important tenet of Islam is *tauheed*, the oneness of Allah. Not only does *tauheed* espouse that there is no other god than Allah, but it also holds that

¹² Baeck, Louis. *The Mediterranean Tradition in Economic Thought*. (London: 1994, Routledge,).

Allah's plan for the universe is perfect. In economic discussion, the importance of *tauheed* is extremely relevant in the discussion of scarcity of resources, as will be explained later. Islamic economic systems directly imply Islamic religious thought. Two major tenets of Islam form the basis of Islamic economics. The single most important tenet of Islam is *tauheed*, the oneness of Allah. Not only does *tauheed* espouse that there is no other god than Allah, but it also holds that Allah's plan for the universe is perfect.¹³

Secara etimologi maqasid al-Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan syari'ah. Maqasid adalah jamak dari maqsid yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹⁴ Sedangkan syari'ah berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqasid al-Syari'ah sebagai nilai, tujuan dan rahasia syara' dalam semua atau sebagian besar hukumnya.¹⁵ Maqasid al-Syari'ah harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka pengembangan hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang belum diatur secara jelas oleh Alquran dan Sunnah. Lebih dari itu, maqasid al-Syari'ah harus diketahui dalam rangka menentukan apakah suatu hukum (khusus dalam bidang muamalah) diterapkan atau tidak dengan adanya perubahan struktur sosial. Al-Syatibi dalam *Muwafaqat*, mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-Syari'ah yaitu maqasid al-Syari'ah, al-Maqasid al-Syar'iyyah fi al-Syari'ah, dan

¹³ Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Development*. (Islamabad: 1993, International Institute of Islamic Thought).

¹⁴ Wehr, Hans, *Dictionary of Modern Written Arabic*. (London : 1980, Mc Donald.) h. 76

¹⁵ Wahbah Zuhaili., *Ushul Fiqhi al-Islami*. jilid II, (Beirut: 1984, Dar al-Fikr al-Mu'ashir.,) h.

maqasid min syar'i al-Hukm, yang pada intinya mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁶

Hasbi Asshiddiqiey mengkonstatir bahwa norma-norma Syariah di bidang muamalah dapat dijangkau daya analisis akal budi sehingga dapat dipahami *maqâsid al-tasyrî'*-nya, dengan panduan prinsip *jalb al-masâlih* dan *dar' al-mafâsid*, di mana segala yang mengandung atau membawa kepada maslahat adalah *mubâh*; dan sebaliknya, segala yang mengandung atau membawa kepada *al-mafsadah* adalah haram.¹⁷ Munawir Sjadzali menyimpulkan bahwa maslahat dan keadilan merupakan tujuan syari'at Islam, dan keadilan merupakan dasar maslahat.¹⁸

Tujuan utama syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) ialah menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini dirumuskan oleh para ulama dalam 5 tujuan (*al-maqashid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).¹⁹ Kelima ranah tersebut memiliki tiga hirarki yaitu dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Dalam kaitannya dengan implementasi tiga hirarki ini dalam

¹⁶ Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) . h. 63-64

¹⁷ Hasbi Asshiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Jilid 2, h. 80.

¹⁸ Munawir Sjadzali, " Reaktualisasi Ajaran Islam ", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 50.

¹⁹ Lihat al-Imam al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz III, hlm. 407. Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz III, hlm. 274.

mengantisipasi kegagalan kapitalisme IV maka ranah kegiatan ekonomi semestinya juga diperhatikan dengan mempertimbangkan tiga hirarki tersebut.

Salah satu wujud implementasi penalaran hukum Islam dalam ranah ekonomi adalah mengeksplorasi kerangka filosofis sebagai maksud syara` untuk membangun fundamen keilmuan ekonomi Islam. Berdasarkan eksplorasi terhadap maksud syara` tersebut dapat dikembangkan tiga dasar kerangka filosofis bangun keilmuan ekonomi Islam yaitu dalam aspek ekonomi real berbasiskan produk halal thayyiba, sistem distribusi ekonomi berbasis filantropi Islam (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf) serta pertumbuhan ekonomi (moneter) berbasis non ribawiy.

Semestinya aspek ekonomi real merupakan asas fundamental dari kegiatan ekonomi sehingga ia harus mendominasi kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan bukan keinginan manusia. Dengan prinsip ini maka kesenjangan kebutuhan dan krisis produksi akan terhindari sehingga bermuara pada kesejahteraan manusia. Aspek keuangan publik berbasiskan shadaqah berada pada hirarki ke dua untuk mengangkat masaqqah (kesulitan) yang timbul dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia akibat kesenjangan kekayaan. Selanjutnya untuk menyempurnakan kedua aspek tersebut diperlukan sistem moneter yang kuat pada hirarki tahsiniyah sehingga aspek real ekonomi dan fiskal menjadi basis dari sistem moneter yang kuat.

Kegagalan state kapitalisme yang didominasi oleh sektor moneter yang rapuh serta fiskal yang tidak adil menyebabkan kapitalisme harus berkhianat dari

makna hakikinya. Beberapa ekonom pasar radikal kanan bahkan mengharamkan sama sekali peran negara dalam perekonomian. Meskipun Friedman menyatakan bahwa eksistensi pasar bebas bukan berarti peran pemerintah sama sekali ditiadakan. Pemerintah tetap dibutuhkan, namun dalam wilayah yang sangat dibatasi. Menurut Friedman, pemerintah diperlukan untuk menetapkan “rules of the game” dan untuk menjamin pelaksanaan aturan-aturan tersebut. Pasar yang efisien dengan sendirinya akan mengurangi peran-peran pemerintah yang tidak perlu. Kelompok ini salah satunya dikenal sebagai “anarcho-liberal”. Namun demikian dengan reinkarnasi kapitalisme menjadi kapitalisme negara bukti betapa kapitalis telah bermetamorfosa mendekati kejadian lawannya (sosialism). Inilah bukti bahwa ajaran Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Sebagai bagian dari paradigma agama Islam, penerapan hukum Islam menjadi misi agama, dan ini menuntut operasionalisasi hukum Islam dalam realitas-empiris. Namun, pada saat yang sama hukum Islam pun menjadi bagian dari paradigma negara yang mempunyai sistemnya sendiri yang *nota bene* diselimuti oleh konteks pluralitas yang menuntut adanya netralitas (tidak berpihak pada salah satu agama) sehingga mau tak mau negara mereduksi hukum Islam demi komitmen atas pluralitas itu sehingga penganut agama lain merasa tidak terancam. Konsekuensinya, masalah penerapan hukum Islam menjadi rumit karena hukum Islam itu berada di domain agama dan domain negara sekaligus, dalam lingkaran tarik-menarik antara prinsip agama dan prinsip negara.

Islam sebagai agama dan ideologi, dilaksanakan secara utuh dengan tiga asas penerapan hukum Islam, pertama ketaqwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syariat Islam, kedua pengawasan masyarakat, dan ketiga Negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syariat Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai agama dan ideologi akan hilang dari bumi Allah ini.²⁰

Karena Islam merupakan sistem yang lengkap dan komprehensif, maka menurut Bahtiar Effendy Islam meliputi tiga “D” yakni *Din* (agama), *Dunya* (dunia) dan *Daulah* (Negara). Dengan sifatnya yang komprehensif ini Islam dipandang sebagai sebuah totalitas yang padu yang menawarkan solusi terhadap segenap problema kehidupan. Selanjutnya ia menyatakan :

Islam adalah suatu totalitas yang padu yang menawarkan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya, dan harus diterapkan dalam keluarga, ekonomi dan politik. (Bagi kalangan muslim) realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam, yakni sebuah “Negara ideologis” yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.²¹

Islam sebagai sebuah sistem hukum memuat asas-asas yang universal dan dapat berkembang dengan sistem hukum positif yang dianut di Indonesia. Namun

²⁰ Hafidz Abdurrahman, *Islam Pilitik dan Spritual*, (Singapore : Lisan Ul-Haq, 1998), h. 210

²¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1998), hal. 7.

dari sisi lain tantangan disintegrasi bangsa serta masih lambannya produktifitas perundangan merupakan tantangan besar dalam upaya positivisasi hukum Islam itu sendiri. Hal ini diperparah dengan *absurd*-nya berbagai tujuan politik, ekonomi dan kultural dengan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat muslim.²²

D. Penutup

Kapitalisme telah gagal mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Untuk itu menjadi keniscayaan bagi umat manusia zaman sekarang untuk mendekonstruksi ekonomi kapitalisme dan merekonstruksi ekonomi berkeadilan dan berketuhanan yang disebut dengan ekonomi syariah. Dekonstruksi artinya meruntuhkan paradigma, sistem dan konstruksi materialisme kapitalisme, lalu menggantinya dengan sistem dan paradigma syari'ah. Capaian-capaian positif di bidang sains dan teknologi tetap ada yang bisa kita manfaatkan, Artinya puing-puing keruntuhan tersebut ada yang bisa digunakan, seperti alat-alat analisis matematis dan ekonometrik, dsb. Sedangkan nilai-nilai negatif, paradigma konsep dan teori yang destruktif, filosofi materialisme, pengabaian moral dan banyak lagi konsep kapitalisme di bidang moneter dan ekonomi pembangunan yang harus didekonstruksi. Karena tanpa upaya dekonstruksi, krisis demi krisis pasti terus terjadi, ketidakadilan ekonomi di dunia akan semakin merajalela, kesenjangan ekonomi makin menganga, kezaliman melalui sistem riba dan mata uang kertas semakin hegemonis.

²² Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bag. Ketiga, (Jakarta: 1999, Rajawali Press) h.xi

DAFTAR BACAAN

- al-Amidiy, Ali ibn Muhammad, *al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr,, tt).
- Baeck, Louis. *The Mediterranean Tradition in Economic Thought*. (London: 1994, Routledge,).
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1998)
- Bonnie Setiawan, *Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga*, (Jakarta: 1999, Insist Press,)
- Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Development*. (Islamabad: 1993, International Institute of Islamic Thought).
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: 2006, Alfabeta)
- Eric Haijer, *Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia*, dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 10 no. 1, Juli 2006. H. 91
- Fukuyama, Francis, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, (Jakarta: 2005, Gramedia)
- Gregory Grossman. *Sistem-sistem ekonomi. Cetakan ketiga*. (Jakarta: 1995, PT Bumi Aksara)
- Hafidz Abdurrahman, *Islam Pilitik dan Spritual*, (Singapore : Lisan Ul-Haq, 1998),
- Hasbi Asshiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bag. Ketiga, (Jakarta: 1999, Rajawali Press)
- J. H. Bocke, *Economics and Economic Policy of Dual Societies As Exemplified by Indonesia* (Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1953)
- K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris dan Jerman*, (Jakarta: 2002, Gramedia)
- M. Ismail Yusanto, *Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam*, (Bogor: 2003, Al-Azhar Press)
- Munawir Sjadzali, “ Reaktualisasi Ajaran Islam “, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988)
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi; PEndekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: 2000, Rajagrafindo Persada)

- Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- United Nations Development Programme (2007), Human Development Report 2007/2008: Fighting Climate Change, Human Solidarity in a Divided World, New York: Palgrave Mcmillan.
- Wahbah Zuhaili,. *Ushul Fiqhi al-Islami*. jilid II, (Beirut: 1984, Dar al-Fikr al-Mu'ashir)
- Walter E. Grinder & John Hagel, *Toward A Theory Of State Capitalism: Ultimate Decision-Making And Class Structure*, dalam Journal of Librarian Studies, Vol.1. I. No. I, h. 59-79. Pergamon Preu 1917. Printed in Great Britain
- Wehr, Hans, *Dictionary of Modern Written Arabic*. (London : 1980, Mc Donald.)